

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pantai dalam Pengembangan Pariwisata dan Kelestarian Lingkungan Hayati Daerah Pantai

Florentina Ratih Wulandari, M.Si
(rwulan@ut.ac.id)
Universitas Terbuka

Makalah ini sebagai wacana yang berupaya mengungkapkan berbagai gagasan pemberdayaan masyarakat pantai dalam pengembangan pariwisata dan kelestarian lingkungan hayati daerah pantai. Dari seluruh wilayah Indonesia, duapertiganya adalah wilayah lautan yang ditebahi dengan pulau-pulau eksotis yang berpotensi pariwisata. Pariwisata pantai merupakan potensi pariwisata yang dapat dikelola secara terintegrasi (*one stop coastal tourism*). *One stop coastal tourism* dapat digunakan sebagai strategi kebijakan pariwisata daerah untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan kemandirian masyarakat pantai atau pesisir sehingga mengoptimalkan upaya pengentasan kemiskinan pada masyarakat pantai dan pesisir di wilayah Indonesia. Untuk itu, pengelolaan pariwisata pantai harus mengedepankan pemberdayaan masyarakat sekitar, agar ada keberlangsungan dan kelestarian lingkungan hayati. *One stop coastal tourism* didasari untuk kelangsungan hidup lingkungan hayati sesuai target MDGs 2015 poin 7a.

Pariwisata pantai atau pesisir dapat dikembangkan dengan strategi pembangunan yang memanfaatkan modal sosial masyarakat, khususnya rasa saling memiliki masa depan bersama dan bekerja sama sehingga mengoptimalkan kualitas dan kuantitas jaringan, komunikasi, inisiatif, inovasi dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan serta kelestarian lingkungan hayati. Unsur-unsur strategis pengembangan dan pengelolaan pariwisata pantai atau pesisir mencakup, pertama, kebijakan pemerintah dilaksanakan oleh masing-masing daerah dengan pendekatan kontingensi. Kedua, pemberdayaan modal sosial masyarakat pantai atau pesisir dalam pengembangan kawasan pariwisata pantai atau pesisir. Ketiga, pengembangan *e-coastal tourism* secara terpadu dengan sistem *private public partnership*. Keempat, pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur pariwisata pantai atau pesisir serta kemudahan akses. Kelima, inovasi ragam dan fasilitas pariwisata pantai. Keenam, implementasi *private public partnership* dalam industri pariwisata pantai atau pesisir yang mengarah pada pemberdayaan ekonomi masyarakat pantai dengan menonjolkan kearifan budaya lokal terhadap alam.

Keyword: pemberdayaan masyarakat pantai, *one stop coastal tourism*, kebijakan pemerintah, MDGs 2015, pengentasan kemiskinan

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pantai dalam Pengembangan Pariwisata dan Kelestarian Lingkungan Hayati Daerah Pantai

Pendahuluan

Negara kepulauan di dunia Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan ± 18.110 pulau yang dimilikinya dengan garis pantai sepanjang 108.000 km tentunya memiliki modal untuk mengembangkan potensi pariwisata pantai yang dimilikinya. Secara umum, masyarakat Indonesia memiliki ikatan budaya agraris yang bertautan dengan budaya bahari. Potensi wisata bahari dan pantai dapat dieksplorasi secara optimal, dengan berbagai pendekatan pembangunan serta kebijakan ekonomi dan sosial, yang mendasarkan pada nilai-nilai budaya local, sehingga akar budaya masyarakat pantai setempat member warna eksotisme pengembangan pariwisata dan pelestarian lingkungan hayati daerah pantai. Seperti yang dituliskan dalam artikel “Mengelola Laut” bahwa salah satu potensi sumber daya alam yang bisa diandalkan untuk bersaing dalam perdagangan bebas atau *free trade*, sebagai konsekuensi *international agreement*, seperti ASEAN-China free trade agreement (ACFTA) maupun perjanjian dagang internasional lainnya adalah sektor kelautan. Hal ini didasari pemikiran bahwa potensi kelautan itu belum banyak disentuh, baik dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) maupun kawasan sepanjang pantai. Dari Sabang sampai Merauke dengan luas lautan sekitar 3,1 juta Km², ZEE 2,7 juta Km² dan panjang pantai 81.000 km (nomor empat di dunia) mengandung potensi ekonomi yang bernilai ekonomis tinggi. (“Mengelola Potensi Laut” pada <http://bp2ip-surabaya.ac.id/?p=archivecat&l=id&newsaction=shownews&nid=471> diunduh Senin 9 Juli 2012 pkl. 15.54 WIB). Selama ini, fakta di Indonesia, belum terkelola potensi laut dengan optimal lebih karena kecenderungan *political will* pemerintah dan sebagian persepsi masyarakat yang lebih mengutamakan budi daya hasil-hasil agraris serta wilayah daratan.

Kurang kuatnya *political will* pemerintah untuk bidang bahari, khususnya pantai menjadi salah satu faktor belum terberdayanya potensi bahari untuk perekonomian nasional secara umum dan wilayah bahari-pantai setempat. Padahal laut memiliki peran strategis, yakni selain nilai ekonomis yang menjanjikan sekaligus juga memiliki potensi menyatukan pulau-pulau yang terpisah di Indonesia. (“Mengelola Potensi Laut” pada <http://bp2ip-surabaya.ac.id/?p=archivecat&l=id&newsaction=shownews&nid=471> diunduh Senin 9 Juli 2012 pkl. 15.56 wib)

Oleh sebab itu, makalah ini sebagai wacana yang berupaya mengungkapkan berbagai gagasan pemberdayaan masyarakat pantai dalam pengembangan pariwisata dan kelestarian lingkungan hayati daerah pantai. Hal tersebut didasari pemikiran bahwa seluruh wilayah Indonesia, duapertiganya adalah wilayah lautan yang ditebari dengan pulau-pulau eksotis yang berpotensi pariwisata.

Pembahasan

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki potensi pengembangan pariwisata dan kelestarian lingkungan hayati daerah pantai. Selama ini, pengembangan dan pembangunan wilayah pantai belum dilakukan secara massif dan terintegrasi dengan pengembangan pembangunan wilayah daratan yang sudah ada.

Salah satu artikel ilmiah terdahulu, menunjukkan perlunya penataan wilayah pantai yang terintegrasi antara zona wisata pantai, wisata budaya dan permukiman nelayan serta zona yang dapat dikonservasi. Hal ini dinyatakan oleh Edwin Permana, Happy Ratna Santosa, dan Bambang Soemardiono dalam makalahnya “Integrasi Pengembangan Wisata Pantai dan Permukiman Nelayan di Pesisir Barat Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Rangka Konservasi Alam” (disampaikan dalam Seminar Nasional Perumahan dan Permukiman dalam Pembangunan Kota 2010 Jurusan Arsitektur FTSP ITS) bahwa keikutsertaan masyarakat sekitar dapat menjaga kelestarian lingkungan setempat sehingga terjadi integrasi antara kawasan wisata pantai dan permukiman nelayan dengan tujuan konservasi alam. Berdasarkan pemanfaatan dapat dibagi dalam 4 zona yaitu : zona wisata pantai, wisata budaya dan permukiman Nelayan, zona permukiman dan persawahan serta daerah yang dapat dikonservasi. Penyediaan fasilitas kepariwisataan didasarkan pada pembagian zona yang memiliki kedekatan fungsi serta menciptakan keterhubungan antarkawasan wisata guna memudahkan aksesibilitas pengunjung. (<http://mirahawaniar.blogspot.com/2011/10/peran-masyarakat-dalam-pembangunan.html>)

Pariwisata pantai merupakan potensi pariwisata yang dapat dikelola secara terintegrasi (*one stop coastal tourism*). Hal ini merujuk pada prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan sesuai kesepakatan *Pacific Ministers Conference on Tourism and Environment* di Maldivest tahun 1997 yang meliputi kesejahteraan lokal, penciptaan lapangan kerja, konservasi sumber daya alam, pemeliharaan dan peningkatan kualitas hidup antar generasi dalam distribusi kesejahteraan. (Akil, Syarifuddin. (2003). “Implementasi kebijakan Sektor dalam Pengembangan Pariwisata

Berkelanjutan dari Perspektif Penataan Ruang” pada <http://www.penataanruang.net/taru/Makalah/DirjenPR-pariwisata.pdf>, diunduh hari Jum’at 7 Juli 2012 pkl. 15.21 WIB).

One stop coastal tourism dapat digunakan sebagai strategi kebijakan pariwisata daerah untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan kemandirian masyarakat pantai atau pesisir sehingga mengoptimalkan upaya pengentasan kemiskinan pada masyarakat pantai dan pesisir di wilayah Indonesia. Untuk itu, pengelolaan pariwisata pantai harus mengedepankan pemberdayaan masyarakat sekitar, agar ada keberlangsungan dan kelestarian lingkungan hayati. *One stop coastal tourism* didasari untuk kelangsungan hidup lingkungan hayati sesuai target MDGs 2015 poin 7a.

Kebijakan Pemerintah

Lima rencana aksi KTT Segitiga Karang tahun 2009 dan ekonomi biru adalah *political will* lingkungan eksternal yang mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia dalam pembangunan wilayah bahari, pesisir dan pulau-pulau kecil. Indonesia sendiri telah mencanangkan sasaran konservasi laut nasional mencapai 20 juta hektar pada tahun 2020. Lima rencana aksi KTT Segitiga Karang tahun 2009, antara lain, *pertama*, memperkuat pengelolaan laut lepas olahan. *Kedua* mempromosikan pendekatan ekosistem terhadap pengelolaan perikanan. *Ketiga*, meningkatkan manajemen yang efektif dari daerah perlindungan laut. *Keempat* meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir terhadap perubahan iklim dan bencana alam. *Kelima*, melindungi spesies langka.

Di atas telah diutarakan tentang ekonomi biru. ekonomi biru atau ‘ekonomi hijau dalam dunia biru’ merupakan kebijakan pengelolaan laut secara berkelanjutan atau yang dikenal sebagai ekonomi ramah lingkungan di lautan. Ekonomi biru ini meliputi perlindungan lingkungan laut dan pengelolaan sumber daya laut, khususnya perikanan. Hal ini juga yang dinyatakan sebagai Commitment at Rio+20, yang ditetapkan di Rio de Janeiro pada Juni 2012 (diunduh dari “Ekonomi Biru untuk Ketahanan Pangan Masyarakat Pesisir” pada http://www.kp3k.kkp.go.id/webbaru/newsroom/info_media/201/, Kamis 5 Juli 2012 pkl. 12.02 WIB).

Wujud kebijakan Pemerintah RI lainnya terkait dengan hal ini, adalah Bappenas akan melaksanakan program Marginal Fishing Community Development Pilot (MFCDP) sebagai program percontohan di 6 (enam) propinsi yang terdiri dari Propinsi Sumatra Utara (di Kabupaten Tapanuli Tengah), Propinsi Nusa Tenggara Barat (di Kabupaten Dompu), Propinsi

Sulawesi Utara (di Kabupaten Kepulauan Sangihe), Propinsi Banten (di Kabupaten Serang), Propinsi Sulawesi Selatan (di Kabupaten Bantaeng) dan Propinsi Sulawesi Tenggara (di Kabupaten Muna). Program MFCDP ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat pesisir dan nelayan kecil dalam mengatasi akar permasalahan penyebab kemiskinan. Program MFCDP adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan kecil dalam mengelola sumberdaya perikanan yang lebih baik melalui upaya pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu dan berkelanjutan. Latar belakang program MFCDP adalah persoalan kemiskinan nelayan pantai, isu-isu strategis tentang pengelolaan kawasan pesisir, misalnya eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan daya produksi alam, terbatasnya sarana pelayanan dasar, rendahnya penggunaan teknologi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya posisi tawar nelayan kecil, ketergantungan kepada pasar dan terbatasnya aksesibilitas nelayan kecil dalam pembuatan kebijakan dan kelembagaan masyarakat desa, tumpang tindihnya kebijakan regulasi kehidupan masyarakat pesisir dan perikanan. Hasil yang diharapkan dari pilot program adalah terwujudnya pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang berbasis kesepakatan antara pengguna sumberdaya pesisir dan laut yang dituangkan dalam dokumen RPP (Rencana Pengembangan Perikanan) dan RPKP (Rencana Pengembangan Kawasan Pesisir), terwujudnya sarana dan prasarana sosial ekonomi sebagai pendukung usaha nelayan, terwujudnya pengembangan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan, terwujudnya jaringan akses pasar bagi nelayan, meningkatnya kemampuan nelayan dalam melakukan usaha serta terwujudnya dan berkembangnya kebijakan baru tentang pengelolaan kawasan dan sumberdaya pesisir berdasarkan partisipasi masyarakat lokal. (diunduh dari <http://www.bappenas.go.id/print/1224/-program-marginal-fishing-community-development-pilot-mfcdp/> diunduh hari Kamis 6 Juli 2012 pkl. 11.25).

Political will lingkungan eksternal telah mendorong secara positif upaya Pemerintah RI untuk mengeluarkan kebijakan yang mengakomodasi ekonomi biru. Salah satunya adalah komitmen nyata pengelolaan sumber daya laut dan pesisir, dimana Pemerintah RI telah menetapkan kawasan konversasi Laut Sawu seluas 3,5 juta hektar sebagai kawasan konservasi laut yang mana merupakan kawasan konservasi laut terbesar di Asia Tenggara dan salah satu yang terbesar dari jenisnya di dunia. Pengelolaan kawasan konservasi Laut Sawu menekankan efektivitas manajemen konservasi. Data KP3K menunjukkan sampai Juni 2012, Indonesia telah berhasil menetapkan kawasan konservasi laut seluas 15,35 juta ha (76,75 %) dari target yang

telah ditetapkan sebesar 20 juta ha pada tahun 2020. (diunduh dari http://www.kp3k.kkp.go.id/webbaru/newsroom/info_media/203 pada hari Kamis 5 Juli 2012 pk1. 12.06 WIB)

Dari aspek legal yuridis, wujud nyata terpenting seriusnya komitmen Pemerintah RI akan pengembangan pariwisata dan kelestarian lingkungan hayati adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 (UU No.27/2007) tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K). Sementara ini UU No.27/2007 diuji material tahun 2010, menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi, untuk menghindari pengalihan tanggung jawab penguasaan negara atas pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil kepada pihak swasta, maka negara dapat memberikan hak pengelolaan tersebut melalui mekanisme perizinan. Melalui mekanisme perizinan, pengelolaan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil tidak meninggalkan masyarakat pesisir, khususnya masyarakat adat yang sudah sejak dahulu kala melakukan pengelolaan perairan pesisir secara arif dan melestarikannya. (diunduh dari <http://www.kp3k.kkp.go.id/webbaru/newsroom/perspektif/10/usai-eksaminasi-uu-no-27-tahun-2007> Kamis 5 Juli 2012 pk1. 12.14 WIB)

Pariwisata pantai atau pesisir dapat dikembangkan dengan strategi pembangunan yang memanfaatkan modal sosial masyarakat, khususnya rasa saling memiliki masa depan bersama dan bekerja sama sehingga mengoptimalkan kualitas dan kuantitas jaringan, komunikasi, inisiatif, inovasi dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan serta kelestarian lingkungan hayati. Unsur-unsur strategis pengembangan dan pengelolaan pariwisata pantai atau pesisir mencakup, *pertama*, kebijakan pemerintah akan pengembangan pariwisata pantai atau pesisir yang secara operasional dapat dilaksanakan oleh masing-masing daerah dengan pendekatan kontingensi (sesuai karakteristik geografis dan sosio kultural masyarakatnya). Namun hal ini perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan benturan antara pemerintah daerah setempat dengan masyarakat. Upaya tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan dan mengikutsertakan masyarakat setempat dalam pembuatan kebijakan, agar kebijakan pengelolaan kawasan pantai, pesisir dan bahari didukung masyarakat banyak. Salah satu contoh kurang optimalnya kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam laut dan pesisir adalah upaya Pemerintah Lampung Timur dalam menjaga sumber daya alam laut dan pesisir melalui peneritan peraturan daerah (perda), terkait hal tersebut. Namun implementasi belum ada mekanisme perencanaan dan pengendalian program yang melibatkan peran serta masyarakat setempat secara langsung. (Nurbaningsih, Enny dan Tisnanta,

H.S. dalam Soetono, Rosdianasari dan Farouk (Ed.), 2006: 33), sehingga perda tersebut masih jauh dari harapan. *Kedua*, pemberdayaan modal sosial masyarakat pantai atau pesisir dalam pengembangan kawasan pariwisata pantai atau pesisir, berupa terbukanya akses peran serta masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya (pemerintah daerah, tokoh adat, perguruan tinggi setempat, LSM dan lainnya) dalam pembuatan kebijakan pengembangan pariwisata pantai, pelatihan, pendampingan dan kemitraan usaha ekonomi kreatif masyarakat yang mendukung pariwisata pantai. *Ketiga*, pengembangan *e-coastal tourism* secara terpadu antara elemen masyarakat pantai atau pesisir, swasta dan pemerintah. Implementasi *private public partnership* yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat dan modal sosialnya dalam pengembangan dan ekonomi kreatif pariwisata pantai atau pesisir. *Keempat*, pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur yang mendukung kualitas dan kuantitas pariwisata pantai atau pesisir serta kemudahan akses. *Kelima*, inovasi ragam dan fasilitas pariwisata pantai, salah satu contoh praktik terbaik adalah paket pariwisata bahari Maldives untuk semua kalangan, salah satunya paket pariwisata pelajar dalam studi Biosphere Expeditions' Coral Reef & Whale Shark Study, wisata medis (herbal) yang sudah dimulai pada Indonesia Herb Festival 2011 di Kuta, Bali dan lainnya. *Keenam*, implementasi *private public partnership* dalam industri pariwisata pantai atau pesisir yang mengarah pada pemberdayaan ekonomi masyarakat pantai melalui pemberdayaan potensi tenaga kerja masyarakat sekitar, budaya dan kearifan lokal dalam melestarikan lingkungan hidup kawasan tersebut, contohnya akomodasi tempat tinggal penduduk untuk pariwisata yang menonjolkan kearifan budaya lokal terhadap alam. Hal ini sudah diterapkan oleh Jepang, di kawasan kota tua Nara, Jepang, dimana rumah-rumah penduduk yang berarsitektur lama tetap dipertahankan untuk menjadi hotel atau penginapan bagi turis asing maupun domestik. Selain itu, lingkungan hayati baik botani maupun fauna, yakni rusa tetap dipelihara baik sejak berabad-abad yang lalu. Keramahtamahan penduduk dan kearifan lokal dalam melestarikan budaya dan lingkungan hayati tersebut inilah yang menjadi nilai tambah wisata konservasi kota tua di Nara, Jepang. Contoh di atas merupakan contoh praktik terbaik pariwisata dan konservasi budaya-lingkungan hayati terpadu seperti yang dapat dilakukan melalui *one stop coastal tourism*. Tindak lanjut implementasi *private public partnership* dalam industri pariwisata pantai atau pesisir adalah pembudidayaan hasil-hasil laut yang berkualitas dan sehat, pemberdayaan hasil-hasil karya budaya kreatif dan pagelaran atau festival pariwisata pantai yang rutin.

Hasil yang kemungkinan dapat dicapai adalah adanya perubahan paradigma dan sikap hidup masyarakat pesisir dan pantai yang mendukung pengembangan pariwisata dan kelestarian lingkungan hayati daerah pantai. Hal ini merupakan salah satu bentuk modernisasi yang membumi dengan bertumpu pada penonjolan kearifan budaya lokal. Seperti yang disampaikan oleh Huntington (dalam Suwarsono dan So, 1991: 22-25) bahwa modernisasi merupakan proses bertahap, modernisasi sebagai proses yang tidak bergerak mundur, modernisasi merupakan perubahan progresif yang memerlukan waktu panjang, sebagai proses sistemik, sebagai proses transformasi dan melibatkan proses yang terus menerus, dalam hal ini transformasi dari masyarakat pantai yang biasa menjadi masyarakat pantai yang madani dan berkualitas. Oleh sebab itu, modernisasi terkait dengan manajemen kualitas dengan pendekatan *total quality control* atas masukan, proses dan keluaran kebijakan pengembangan pariwisata dan kelestarian lingkungan hayati daerah pantai, yang tetap melibatkan masyarakat dan pemerintah setempat.

Salah satu contoh daerah yang menghadapi tantangan besar dalam pengembangan wilayah pesisir, adalah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, khususnya pada pembangunan sektor pariwisata yang belum tergarap optimal. Luas Objek Wisata dan investor yang telah menanamkan modalnya, antara lain :

1. Pantai Carocok Painan, Luas 3 Ha.
2. Jembatan Akar, Luas 1 Ha.
3. Taratak Surantih, Luas 5 Ha.
4. Batu Kalang, Luas 6 Ha.
5. Air Terjun Bayang Sani, Luas 4 Ha.
6. Pantai Sumedang, Luas 8 Ha.
7. Pantai Ketaping, Luas 1 Ha.
8. Pulau Cubadak, Luas 9 Ha, Investor dari Italia.
9. Pulau Pagang, Luas 12 Ha, Investor dari Indonesia. (diunduh dari [http:// pesisirs selatan.go.id / index. php? mod=investasi&id=7](http://pesisirs selatan.go.id/index.php?mod=investasi&id=7) hari Kamis 5 Juli 2012 pkl. 11.35 WIB)



Gambar Panorama Pantai Carocok Painan

Sumber: diunduh dari <http://pesisirselatan.go.id/index.php?mod=investasi&id=7>, Kamis 5 Juli 2012 pkl. 11.35 WIB

Objek wisata dari no. 1 sampai dengan 7 terlihat potensi ekonomi dan pariwisata belum tergarap optimal bersama pihak swasta dalam metode *private public partnership*. Potensi kelautan lainnya, berikut dibawah ini:

Potensi Kelautan

Sektor Kelautan dan Perikanan

1. Sumber Daya Hayati

- Sumber Daya Ikan
 - ✓ Ikan Pelagis Besar dan Kecil (+ 34.008 ton / tahun)
 - ✓ Ikan Demersal (+ 60.435,73 ton / tahun)
 - ✓ Ikan Hias Air Laut (+ 14.516.400 ekor / tahun)
 - ✓ Udang -Udangan (+ 556,27 ton / tahun)
- Ekosistem Mangrove : + 325 Ha
- Terumbu Karang : Sepanjang Perairan Pantai

2. Sumber Daya Non Hayati

- Perairan Teluk : 5 Teluk (T. Mandeh, T. Painan, T. Sei. Nipah, T. Betung, T. Sei Bungin)
- Perairan Laut : + 2.347,72 Ha (Budidaya Laut)
- Perairan Payau : + 26.278,18 Ha
- Pulau-Pulau Kecil : 53 Pulau
- Rawa dan Telaga : + 491 Ha
- Sungai : 22 Buah

Sumber: diunduh dari <http://pesisirselatan.go.id/index.php?mod=potensi>, hari Kamis 5 Juli 2012 pkl. 11.39 WIB

Contoh lain daerah yang berupaya menanggulungan dan pengentasan kemiskinan masyarakat pantai atau pesisir adalah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur yang sejak tahun 2010 telah melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP), yang dialokasikan pada 8 Kabupaten, 8 desa pesisir di Jawa Timur. (diunduh dari <http://bapemas.jatimprov.go.id/index.php/program>

/kegiatan-sda- ttg /288-pemberdayaan- masyarakat-pesisir-pantai, pada hari Selasa 22 Mei 2012 pkl. 11.06 WIB).

Tantangan ke depan adalah mengelola potensi wisata (pantai atau bahari) medis yang diprediksi akan menjadi faktor utama kegiatan perekonomian Asia Pasifik. Hal ini merujuk pada hasil penelitian Frost dan Sullivan yang memprediksi pasar kesehatan Asia Pasifik akan mewakili 34.6% pasar kesehatan global pada tahun 2015. Hasil temuan Frost dan Sullivan menunjukkan bahwa pada 2020, pengeluaran biaya kesehatan di Asia Pasifik akan meningkat sebesar 151% mencapai US\$2927 miliar pada CAGR 9.2%. Sedangkan biaya belanja kesehatan Indonesia diprediksi akan mencapai U\$47 miliar di tahun 2020 pada CAGR 8.1% selama periode 2010-2020. Pada tahun 2012, pasar wisata medis diperkirakan akan mencapai US\$4.4 miliar. Rujukan persyaratan bagi rumah sakit-rumah sakit yang ingin berpartisipasi dalam wisata medis adalah kode etik yang ditetapkan oleh badan akreditasi Internasional seperti JCI (Joint Commision International). (diunduh dari <http://the-marketeers.com/archives/wisata-medis-faktor-utama-kegiatan-perekonomian-asia-pasifik.html> diunduh Selasa 22 Mei 2012 pkl. 1017 WIB). Adapun contoh praktik pengelolaan wisata pantai terbaik adalah Indonesia Herb Festival 2011 (IHF 2011), dengan tema *The Lesson Learned from Indonesian Herb: Tasty – Healthy – Beauty*, pada 26 – 27 Mei 2011 di Klapa – New Kuta Beach Pecatu, Bali, (diunduh dari <http://www.pata-indonesia.org/indonesia-gelar-festival-herbal-pertama-di-bali/> pada hari Selasa 22 Mei 2012 pkl. 10.19). Sebagai insentif berkembangnya pemberdayaan masyarakat pantai dalam pengembangan pariwisata dan kelestarian lingkungan hayati daerah pantai maka Pemerintah RI, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan penghargaan Piagam Penghargaan Pesisir (*Coastal Award*) kepada daerah-daerah di Indonesia. (diunduh dari <http://www.kp3k.kkp.go.id/webbaru/content/artikel/event/181/penghargaan-pesisir-coastal-award-tahun-2012>, Kamis 5 Juli 2012 pkl. 11.56 WIB)

Simpulan

Indonesia adalah negara bahari yang berpotensi besar, dalam berbagai aspek sumber daya alam hayati dan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat pantai dalam pengembangan pariwisata dan kelestarian lingkungan hayati daerah pantai menjadi salah satu tujuan kebijakan ekonomi biru pemerintah yang mengakomodasi MDGs 2015, khususnya tujuan 7a. *One stop coastal tourism* merupakan salah satu alternatif strategi dalam wacana yang

menawarkan pemberdayaan masyarakat pantai dalam pengembangan pariwisata dan kelestarian lingkungan hayati daerah pantai, dengan menonjolkan dan melestarikan kearsifan budaya lokal dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayahnya (community driven development). community driven development bagi masyarakat nelayan pantai serta pesisir juga pernah digagas Bappenas, dan sekarang dirintis dalam program MFCDP. Modernisasi yang bumi, berkelanjutan, berkualitas dan manusiawi dalam mekanisme pembangunan nasional, khususnya pengembangan pariwisata dan kelestarian lingkungan hayati daerah pantai merupakan hal yang perlu dilakukan terus menerus dan melibatkan masyarakat dengan *political will* pemerintah yang kuat dan nyata dalam paradigm ekonomi biru.

Daftar Pustaka

- Akil, Syarifuddin. (2003). "Implementasi kebijakan Sektor dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dari Perspektif Penataan Ruang" pada <http://www.penataanruang.net/taru/Makalah/DirjenPR-pariwisata.pdf>, diunduh hari Jum'at 7 Juli 2012 pk. 15.21 WIB
- Artikel "Mengelola Potensi Laut" pada <http://bp2ip-surabaya.ac.id/?p=archivecat&l=id &newsaction=shownews &nid=471> diunduh Senin 9 Juli 2012
- Artikel "Peran Masyarakat Dalam Pembangunan" pada <http://mirahawaniar.blogspot.com/2011/10/peran-masyarakat-dalam-pembangunan.html>
- Artikel "Ekonomi Biru untuk Ketahanan Pangan Masyarakat Pesisir" pada http://www.kp3k.kkp.go.id/webbaru/newsroom/info_media/201/, diunduh Kamis 5 Juli 2012
- Artikel "Program Marginal Fishing Community Development Pilot MFCDP" pada <http://www.bappenas.go.id/print/1224/-program-marginal-fishing-community-development-pilot-mfcdp>
- Artikel "Usai Eksaminasi UU No 27 Tahun 2007" pada <http://www.kp3k.kkp.go.id/webbaru/newsroom/perspektif/10/>
- Artikel "Program Marginal Fishing Community Development Pilot MFCDP" pada <http://www.bappenas.go.id/print/1224/-> diunduh hari Kamis 6 Juli 2012
- <http://pesisirselayan.go.id/index.php?mod=investasi&id=7> hari Kamis 5 Juli 2012 pk. 11.35 WIB
- Artikel "Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai" pada <http://bapemas.jatimprov.go.id/index.php/program/kegiatan-sda-ttg/288>
- Artikel "Wisata Medis Faktor Utama Kegiatan Perekonomian Asia Pasifik" pada <http://themarketeers.com/archives/.html> diunduh Selasa 22 Mei 2012 pk. 1017 WIB
- Artikel "Indonesia Gelar Festival Herbal Pertama di Bali" pada <http://www.pataindonesia.org//>
- Artikel "Penghargaan Pesisir Coastal Award Tahun 2012" pada <http://www.kp3k.kkp.go.id/webbaru/content/artikel/event/181/>
- Suwarsono dan So, Alvin Y. (1991). *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia: Teori-Teori Modernisasi Dependensi dan Sistem Dunia*. Jakarta: LP3ES.
- Soetono, Bambang, Rosdianasari, Eko Susi dan Farouk Peri Umar (Ed.). (2006). *Prosiding Seminar dan Lokakarya Nasional Menelaah Perda untuk Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas Pengimplementasian Perda "Menggagas Penyusunan dan Implementasi*

Perda yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel”. Jakarta: YIPD-World Bank- Justice for Poor.